

SEJARAH POLITIK DAN DINAMIKA AGRARIS KAWASAN TIMUR INDONESIA

The History of Politic and the Dynamic of Agrarian in The Eastern Region of Indonesia

Tri Pranadji

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

From the agrarian politic history view, the eastern region of Indonesia has a relatively strong competition potential in the global arena. However, since the past five decades, the capacity of socio-economic-politic-culture of the eastern region of Indonesia was degraded to the lowest level. The political planning concern of the central government in the agrarian resource development management is the obstacle point to allow serious implication on social gap and backwardness. The agrarian politic set back in the western part of Indonesia has a heavy influence on the community's socio-economic livelihood who are depending on local agrarian resources. The prominent ability of several local kings of kingdoms in the eastern Indonesia to perform agricultural trade at a global level during the period of 15-18 centuries has no longer existed. In the future, a strong political support is required to reform agrarian development planning for the eastern region of Indonesia. The plan should cover: First, the vision and direction to establish a strong, self-support, high competitive, fair, and sustainable industrial community based on the existing agrarian resource management. Second, to produce high value of agrarian products, manage by integrated organizations, use high technology and innovation, apply sharing system on collective assets, and select appropriate business adjusted to the existing local agro-ecosystems. Third, strengthen infrastructure networks, support financial institutions, and apply law enforcement in accordance with good governance in a decentralized government administration. Fourth, to establish the community's rights to express their political opinion and aspiration, to involve in organization (economic, society, and politic), and support on local wisdom. Fifth, to perform policies that integrates agrarian management, safety and defense, and the empowerment of civil society in the eastern part of Indonesia.

Key words : *history, planning, agrarian politic, regional dynamic, eastern region*

ABSTRAK

Dilihat dari sejarah politik agraria, kawasan timur Indonesia mempunyai potensi daya kompetisi relatif kuat dalam "pertarungan" global. Hanya saja, sejak lima dekade terakhir secara sosio-ekonomi-politik-budaya kawasan timur Indonesia berbalik menjadi sangat memprihatinkan. Kepedulian politik perencanaan pemerintah pusat dalam pengembangan pengelolaan sumber daya agraria setempat tampaknya menjadi titik lemah yang berimplikasi serius terhadap munculnya keterbelakangan dan kesenjangan sosial. Kemunduran politik agraria yang terjadi di kawasan barat Indonesia berimbas sangat berat terhadap tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan sumber daya agraria setempat. Kehebatan kemajuan perdagangan produk agraris yang dikendalikan secara politik di tingkat global oleh beberapa kerajaan di kawasan timur Indonesia pada rentang abad 15-18 saat ini sudah hampir tidak tersisa lagi. Pada masa mendatang perlu dukungan politik yang kuat untuk merumuskan kembali perencanaan pembangunan agraria di kawasan timur Indonesia. Substansi perencanaan mencakup: *Pertama*, visi dan arah yang mengutamakan terbentuknya masyarakat industrial berbasis pengelolaan sumber daya agraria yang kuat, mandiri, berdaya saing tinggi, adil, dan berkelanjutan. *Kedua*, dihasilkannya produk agraria bernilai tambah tinggi, dikelola dengan organisasi yang utuh (tidak tersekat-sekat), sarat dengan muatan iptek tinggi, penguasaan aset secara kolektif dengan *sharing system* yang lebih adil, serta pilihan usaha yang sesuai dengan kekayaan agroekosistem setempat. *Ketiga*, dilakukan penguatan terhadap jaringan infrastruktur, kelembagaan modal finansial, penegakan hukum, serta *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. *Keempat*, penguatan hak-hak warga dalam berpendapat dan beraspirasi secara politik, berorganisasi (ekonomi, kemasyarakatan, dan politik), serta pemberdayaan aspek kearifan lokal. *Kelima*, kebijakan politik yang mengintegrasikan pengelolaan agraria, pertahanan dan keamanan, serta penguatan *civil society* di kawasan timur Indonesia.

Kata kunci: *sejarah, perencanaan, politik agraria, dinamika daerah, kawasan timur*

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya agraris kawasan timur Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat. Jika perkembangan ini ditelaah hanya dalam rentang 3-5 dekade terakhir maka sangat kecil kemungkinannya untuk memperoleh penjelasan yang berarti. Namun jika perkembangan yang dimaksud ditelaah dalam perspektif sejarah 4-6 abad sangat mungkin akan memberikan gambaran berbeda. Sebagai gambaran pada abad 15, kawasan Maluku telah menjadi kawasan perdagangan global (Messakh, 2009; Reid, 2004; Vlekke, 2009). Dapat dikatakan bahwa selama seabad terakhir, agro-ekologi daerah Indonesia timur ini bisa diibaratkan sebagai "raksasa yang ditidurkan". Kebijakan politik perencanaan pembangunan di Jakarta sangat besar andilnya dalam membunuh potensi agro-ekonomi kawasan timur Indonesia, terutama dilihat dari pengelolaan sumber daya agrarisnya.

Politik dan agraria merupakan bagian penting perancangan sejarah kehidupan suatu masyarakat atau negara bangsa yang berdaulat. Pada pertengahan abad 20, khususnya pada rentang 1960-1962, kepedulian politik (melalui operasi militer dan diplomasi, Tri Komando Rakyat) negara terhadap penguasaan daerah bagian timur Indonesia sangat besar. Pengerahan persenjataan, angkatan perang dan sumber daya kedaulatan negara lainnya, dalam rangka perebutan Irian Barat (Anonymous, 2010), menjadi tonggak kebanggaan yang tak ternilai bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena kepedulian terhadap (kemajuan) daerah bagian timur inilah nama besar NKRI menjadi harum dalam percaturan politik global. Sangat disayangkan, pada penggalan-penggalan segmen historis berikutnya (Elson, 2009), kepedulian ini tidak diikuti dengan kemajuan di bidang agraria. Ketika aspek infrastruktur, pengembangan komoditas agraris, ekonomi, sosio-budaya, serta kesejahteraan masyarakatnya ditelantarkan, maka modal kedaulatan politik NKRI seakan-akan menjadi tersia-siakan.

Kepedulian politik agraris untuk pengembangan daerah Indonesia bagian timur

khususnya dalam setengah abad terakhir sangatlah memprihatinkan. Sumber daya kedaulatan negara, khususnya sumber daya agraris yang sangat besar, baik berupa daratan maupun kepulauan (beserta lautnya), hampir menjadi kartu mati dalam percaturan perkembangan perekonomian global dan nasional. Program pengembangan produk-produk agraris yang dari daerah ini sama sekali tidak mampu menembus belantara pasar global. Padahal peluang pasar untuk menampung produk agraris dari daerah ini sangat menjanjikan. Pasar besar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, serta daratan Eropa sangat menganga dan haus terhadap produk-produk agraris dari daratan dan perairan dari daerah ini. Jenis keterbelakangan apakah yang menyebabkan agro-eko-historis di daerah Indonesia bagian timur ini mengalami kemunduran atau pelambatan kemajuan yang amat serius?

Kajian sejarah dan budaya dalam pembangunan pertanian sangatlah penting. Kleden (2008) mengutip sebuah pidato Abraham Lincoln tahun 1862: "*Fellow citizens, we cannot escape history. No personal significance or insignificance can spare one or another of us... We shall nobly save, or meanly lose, the last, best hope of earth*". Mengkaji dengan perspektif sejarah sangat penting. Dengan memperhatikan sejarah perjalanan bangsa Indonesia diharapkan akan terbuka wasasan ke depan yang lebih baik, terutama dalam membangun pertanian di kawasan Indonesia bagian timur. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan pengelolaan sumber daya agraris daerah Indonesia timur dari perspektif agro-eko-historis dan politik perencanaan ekonomi negara.

PERENCANAAN DAN AWAL KEMUNDURAN

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kebijakan politik perencanaan pembangunannya. Sebagai gambaran, ketika pada awal abad 18 Pemerintah Kerajaan Belanda membuat kebijakan politik untuk "membangun ekonomi berbasis sumber daya agraris" di Pulau Jawa (Geertz, 1989; Usman, 2009; Lubis, 2009), maka hanya dalam bebe-

rapa dekade denyut kemajuan ekonomi agraris di Pulau Jawa sangat terasa di Amesterdam (Vlekke, 2009). Melalui sistem perencanaan pembangunan daerah Pulau Jawa (sebagai bagian dari Pemerintah Kerajaan Belanda) yang terarah dan sistematis, dari daerah Pulau Jawa dapat dihasilkan produk agraris yang mendatangkan banyak kemakmuran bagi Pemerintah Kerajaan Belanda (Usman, 2009). Diperoleh informasi bahwa kota Amesterdam awalnya dibangun dari tanah dan "keringat orang Indonesia (Jawa)". Bahkan hingga 1870 dari 70 persen APBN Kerajaan Belanda diperoleh dari hasil perencanaan yang dimaksud (Lubis, 2009).

Dapat dikatakan bahwa setiap jaman dan regim politik mempunyai "selera" sendiri dalam merencanakan dan menentukan prioritas pembangunan, termasuk pembangunan daerah. Pada awal pemerintahan Orde Baru "slogan" modernisasi pertanian dijadikan bagian dari ikon politik sentralisasi pembangunan nasional. Ketika itu dikenal istilah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang pada akhir tahapannya ingin dicapai masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian mimpi masyarakat adil dan makmur tidak dibuat katagori rinci dan spesifik, khususnya yang terkait dengan apa yang akan dicapai di daerah Indonesia bagian timur. Kekhasan geografis, ekologis, sosio-budaya, dan ketersediaan infrastruktur daerah Indonesia bagian timur tidak sepenuhnya dijadikan input dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dilihat dari perspektif historis, modernisasi usaha berbasis pengelolaan sumber daya agraris di kawasan timur Indonesia lebih awal atau bersamaan dengan daerah barat. Modernisasi ini terkait dengan terbukanya pasar dunia, khususnya di Eropa Barat, terhadap produk agraris dari Indonesia. Dapat dikatakan bahwa abad 16 merupakan awal modernisasi usaha berbasis pengelolaan sumber daya agraris Indonesia bagian timur. Masuknya orang Eropa, antara lain Belanda, Spanyol dan Portugis, di perairan Indonesia timur merupakan awal kemajuan peradaban atau modernisasi usaha berbasis sumber daya agraris di Indonesia bagian timur (Hall, 1988; Vlekke, 2009). Modernisasi pengelolaan sumber daya agraris di kawasan ini terjadi hampir bersamaan dengan semakin intensifnya orang-orang Eropa dan Asia timur

melakukan perjalanan dagang ke belahan dunia bagian timur, khususnya kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Gejala kemandekan dan keterbelakangan hingga kini masih menghantui masyarakat dan daerah Indonesia bagian timur. Jika titik tolak melihat dinamika adalah abad 16 (Vlekke, 2009; Usman, 2009), maka dari perspektif historis pengelolaan usaha berbasis sumber daya agraris yang terjadi di Indonesia timur menunjukkan gejala merosot.

Perencanaan dan implementasi pembangunan daerah Indonesia bagian timur hingga kini masih sebatas pada slogan politik untuk menarik simpati masyarakat daerah Indonesia bagian timur. Selain pengelolaan sumber daya publik (misalnya kasus Freeport; Ngadisah, 2002) masih jauh dari transparan dan akuntabel, perkembangan pengelolaan usaha berbasis sumber daya agraris di daerah Indonesia bagian timur juga dapat dikatakan merosot. Manfaat pengelolaan sumber daya agraris oleh orang asing dari Eropa pada abad 17-19 telah dapat mereka rasakan, sehingga dengan itu bangsa Eropa (seperti Spanyol dan Belanda) telah mengalami kemajuan relatif besar. Pada saat ini masyarakat di daerah Indonesia timur relatif masih terbelakang. Sebagai perbandingan, usaha berbasis sumber daya agraris di Amerika dalam seabad terakhir menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Sementara itu, di daerah Indonesia bagian timur cenderung stagnasi dan semakin tidak kompetitif.

Dalam perspektif historis, khususnya dalam penggalan 4-5 abad terakhir, pada kawasan timur Indonesia mengalami kemunduran ekonomi berbasis sumber daya agraris yang sangat luar biasa. Dapat dikemukakan bahwa pada abad 15-16 bandar Indonesia bagian timur, yaitu Makassar (Asba, 2007; Ricklefs, 1991; Vlekke, 2009), sangat ramai disinggahi armada dari berbagai bangsa dari Eropa, Asia Timur dan Daratan Cina. Produk agraris dari kawasan timur Indonesia banyak yang menjadi mata dagang lintas negara. Bandar besar lain, seperti Banten (sebelum digeser ke Batavia oleh VOC), tidak mampu bersaing dengan Makassar. Bandar Singapura sama sekali belum berkembang, dan kalah jauh dibandingkan dengan Bandar Makassar.

Wilayah seperti Maluku, yang dikenal Kasultanan Ternate dan Tidore, dan

Nusa Tenggara, yang dikendalikan Kasultanan Bima, sebelum abad 17, menjadi daerah ramai oleh armada-armada negara Eropa dan Asia Timur lainnya. Hampir dapat dikatakan selama setengah abad terakhir daerah ini telah senyap oleh hilir-mudik armada yang mengangkut hasil agraris bernilai tinggi ke luar Indonesia.

Secara konstitusional, masyarakat daerah Indonesia bagian timur berhak menuntut "persamaan hak" dalam menikmati hasil dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan seperti yang dinikmati masyarakat di kawasan barat Indonesia. Jika perencanaan pembangunan tidak dilakukan mengikuti semangat konstitusi dan hak-hak masyarakat, maka ketika itulah "perencanaan" menjadi "awal" atau titik balik menuju kemunduran.

PERSPEKTIF KEMUNDURAN POLITIK AGRARIS

Sumber daya agraris adalah bagian esensial dari kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintahan suatu negara dalam pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya agraris merupakan indikator kemampuan negara tersebut dalam membangun peradaban masyarakatnya. Transformasi agraria pada masyarakat komunal dapat dipandang sebagai transformasi dari masyarakat itu sendiri (*agriculture as man's transformation*) (Dumont, 1971). Tingkat kehidupan masyarakat agraris setempat dapat dijadikan indikator kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.

Tidak berkembangnya ruh kewirausahaan (*entrepreneurship*) pada masyarakat suatu daerah adalah bagian dari *bottle necking* perkembangan daerah bersangkutan. Dalam 30-50 tahun terakhir, pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya agraris di daerah Indonesia timur terbawa arus pembangunan nasional yang berorientasi pada pemacuan pertumbuhan ekonomi. Dalam kenyataan bahwa pemacuan pertumbuhan ekonomi identik dengan pengurusan sumber daya agraris di pedesaan. Dengan pendekatan pembangunan yang demikian, pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya agraris sangat potensial teralinesasi dengan kehidupan riil masyarakat setempat

dan juga masyarakat (pedesaan) Indonesia secara keseluruhan.

Berdasar konstitusi UUD 1945 tujuan pendirian negara adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat pengembangan usaha berbasis pengelolaan sumber daya agraris teralinesasi dari substansi membangun kehidupan masyarakat, maka pada saat itulah kemajuan agraris tidak dilandaskan pada dukungan dari kekuatan sosio-budaya-politik masyarakat setempat. Dengan gambaran ini dapat dipertanyakan Perencanaan dan implementasi penyelenggaraan pembangunan daerah itu untuk siapa?

Kemajuan masyarakat tidak hanya diukur dengan pemenuhan kebutuhan badan material, melainkan juga jiwa (Sorokin, 1964). Dalam rangka penegakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara teknokratik semangat kebangsaan harus dapat diwujudkan dalam bahasa kepedulian politik perencanaan dan implementasinya di lapangan. Penyelenggaraan pembangunan daerah yang hanya mengutamakan pencapaian budaya material, dan kurang pada penguatan dan pemberdayaan pada aspek sosio-budaya-politik setempat, akan menyebabkan terjadinya pemarjinalan, yang pada akhirnya berbentuk kemiskinan dan keterbelakangan massal.

Terbentuknya jurang kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin besar; misalnya antara petani kaya dan petani miskin, petani di bidang usaha tani dan pengolah hasil dari kegiatan agraris; merupakan indikasi adanya gejala teralinesasinya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dapat dikatakan bahwa kualitas substansi perencanaan pengelolaan sumber daya agraris daerah seharusnya dapat diidentikkan dengan membangun budaya masyarakat di bidang usaha agraris secara komprehensif (Tabel 1).

Dengan memperhatikan jejak sejarah, sangat sulit dibayangkan jika kemajuan masyarakat kawasan timur Indonesia menjadi lambat, atau bahkan tertinggal dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Namun demikian tampaknya hal itu telah menjadi kenyataan yang tidak dapat diingkari, dan hal ini mengingatkan pada kebijakan pembangunan ekonomi dualistik (Boeke, 1982). Secara politis, pemerintah pusat pun mengakui adanya kenyataan ini, yang ditunjukkan dengan di-

Tabel 1. Perspektif Kemajuan Masyarakat Agraris Dilihat dari Indikator Utama Pembangunan Berbasis pada Masyarakat Komunal Secara Berkelanjutan

Dewasa ini	Indikator kemajuan	Di masa datang
Terisolasi dengan perubahan global; taransmisi kemajuan tidak jalan	Basis produksi	Tidak terisolasi dengan perubahan global; transmisi kemajuan jalan
Kurang dipedulikan dalam pengelolaan sumber daya agraris di pedesaan	Tingkat kehidupan masyarakat komunal dan pedesaan	Diutamakan dalam pengelolaan sumber daya agraris di pedesaan
Penguasaan kegiatan hulu dan pemenuhan kecukupan kebutuhan subsistensi	Orientasi budaya masyarakat	Penguasaan seluruh jaringan usaha dan nilai tambah tinggi
Dualistik ekonomi dan secara alamiah terisolasi dengan kebijakan politik	Struktur ekonomi usaha berbasis sumber daya agraris di pedesaan	Keutuhan sistem ekonomi dan hasil kebijakan politik yang kuat
Berbasis ekonomi pasar dan input dari luar ekosistem	Ketahan pangan	Berbasis <i>local wisdom</i> dan agroekosistem setempat
Dibiarkan terkooptasi oleh jaringan ekonomi kapitalis, sebagai bagian dari dinamika ekonomi pasar bebas	Jaringan industri dan pasar	Dikendalikan kuat oleh negara sebagai bagian dari pengembangan <i>inclusive corporate society</i>
Sebagai <i>sub-ordinate</i> dari tatanan masyarakat global	Posisi masyarakat komunal	Sebagai co-ordinate dari tatanan masyarakat global

terbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Daerah Timur Indonesia. Beberapa hal berikut lebih memperjelas keterbelakangan yang dimaksud:

- a. Mengapa sebagian besar masyarakat komunal dan pedesaan di Indonesia bagian timur selama lebih seabad tidak mengalami perkembangan yang berarti. Masyarakat di daratan Papua, yang sangat kaya dengan sumber daya alam, sebagian besar masih berada dalam peradaban agraris sangat tradisional dan sering terancam bahaya kelaparan karena perubahan alam (agroklimat). Demikian juga dengan masyarakat kepulauan di daerah Maluku, Nusa Tenggara dan Sangir Thalaud.
- b. Dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian di tingkat nasional dan global tidak berhasil ditransmisikan dalam kebijakan pengembangan pengelolaan sumber daya agraris pada masyarakat komunal di kawasan timur Indonesia. Momentum historis keterkaitan Indonesia bagian timur dengan kemajuan perda-
- c. Kemajuan kawasan timur Indonesia beberapa abad lalu (Anonymous, 2010) ditunjukkan dengan kuatnya armada pelayaran yang dikendalikan kerajaan-kerajaan maritim (antara lain: Goa, Tidore dan Bima) yang disegani oleh kekuatan armada asing. Dewasa ini pembangunan prasarana hubungan laut Indonesia bagian timur jauh dari semangat keberpihakan pada Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*). Pemikiran Indonesia sebagai negara daratan dan pembangunan bias pada Indonesia bagian barat (Jawa dan Sumatera) menjadi jebakan strategis mengapa pengelolaan sumber daya agraria di daerah Indonesia bagian timur menjadi semakin tertinggal dan sulit berkembang dalam 20-50 tahun terakhir.
- d. Inovasi sosio-budaya-politik untuk pengembangan produk agraris di Indonesia

bagian timur sangatlah lemah. Karena itu, dapat diterima akal sehat jika organisasi petani berbasis pemenuhan kebutuhan subsistensi secara alamiah lebih kuat berkembang dibandingkan budaya kewirausahaan komunal. Kekuatan inisiatif lokal dalam perekayasaan sosio-budaya-politik untuk kemajuan perekonomian masyarakat komunal kawasan timur Indonesia dilemahkan oleh sentralisme perancangan pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya agraris pemerintah pusat.

- e. Pola pembangunan ekonomi dualistik juga dianut oleh pemerintah pusat dalam pengembangan pengelolaan sumber daya agraris kawasan timur Indonesia. Kegiatan ekonomi di sektor hilir (industri, perdagangan dan jasa keuangan) diserahkan pada "kekuatan" kapitalis luar tidak memihak pada pengembangan sektor riil dan usaha skala kecil setempat. Sedangkan di sektor hulu ("agraris") diserahkan pada mekanisme evolusi alamiah yang bersifat etnosentrik dan partikularistik.
- f. Strategi komprehensif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan berbasis masyarakat lokal (dalam usaha berbasis pengelolaan sumber daya agraris) di daerah Indonesia bagian timur hampir tidak dikenal. Dengan perencanaan pembangunan yang masih bersifat sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cepat, maka hampir tidak didapati adanya peluang yang cukup bagi masyarakat agraris pedesaan kawasan timur Indonesia untuk membangun jaringan industri pengolahan produk agraris dan perdagangan global yang kuat.
- g. Kekuatan dan kearifan lokal dalam ketahanan pangan tercabut dari akar budaya dan kekhasan kekayaan ekosistem setempat. Disamping terjadi *local wisdom losses*, juga terjadi "ekspansi" produk pangan luar yang meruntuhkan apresiasi masyarakat terhadap kedaulatan pangan lokal. Selain itu, pada perkembangan kegiatan pengelolaan sumber daya agraria secara komersial cenderung diikuti dengan terjadinya pengurusan kekayaan ekosistem setempat secara massif karena kegiatan komersial tersebut dilakukan secara ekstraktif. Kalangan pelaku-pelaku ekonomi dari luar hampir tidak ada

kepedulian terhadap *common property* setempat.

- h. Jaringan industri pengolah hasil dari pengelolaan sumber daya agraria dan pasar produk agraria umumnya dikuasai oleh pihak luar, yang umumnya adalah penguasa modal finansial dan mempunyai jaringan besar dalam pasar global. Kasus *illegal logging* dan juga *illegal fishing* memberikan keuntungan finansial sangat besar bagi pihak luar, namun dalam jangka menengah dan panjang hal ini sangat merugikan bagi masyarakat setempat dan negara.

POLITIK DAN PERDAGANGAN PRODUK AGRARIS

Pada abad 15-16 bangsa Eropa mengalami kebuntuan kemajuan, dan permintaan produk agraris tropis di Eropa sangat besar. Bangsa Eropa pada abad 15 mulai menjelajahi lautan terbuka untuk mencari rempah-rempah dan mata dagang internasional lainnya. Pelaut hebat seperti Columbus tahun 1492, Vasco da Gama tahun 1498, dan Magelhaen tahun 1519-1522 mampu menemukan daerah-daerah baru yang menghasilkan produk agraris tropis untuk memenuhi permintaan pasar Eropa.

Sebelum pelaut-pelaut Inggris dan Belanda mencapai kawasan timur Indonesia, pelaut-pelaut Spanyol dan Portugis sudah menjalin hubungan perdagangan produk agraris dengan kerajaan-kerajaan setempat (Hall, 1988; Vlekke, 2009). Bangsa Spanyol dan Portugis sudah menjelajahi dan menjalankan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan kecil di pantai selatan Cina, Canton, Filipina, Maluku, Nusa Tenggara dan Sumatera. Sebagai gambaran, Portugis pada awal abad 16 berhasil menjalin hubungan baik dengan Gowa (tahun 1510) dan Malaka (tahun 1511). Dengan masuknya pelaut-pelaut Inggris dan Belanda di perairan Indonesia, kedudukan Portugis dan Spanyol mulai terancam. Pada pertengahan abad 17 Portugis kehilangan Malaka.

Penemuan mata dagang rempah-rempah dan beras oleh bangsa Eropa di daerah Indonesia Timur membuka cakrawala baru bagi pengembangan produk agraris di

daerah Indonesia Timur. Setelah masuknya bangsa Eropa, perebutan monopoli perdagangan di daerah Indonesia Timur menjadi bagian dari dinamika politik pengelolaan sumber daya agraria. Perebutan monopoli perdagangan ini akhirnya dimenangkan oleh bangsa Eropa yang kemudian melemahkan peran kerajaan-kerajaan lokal dalam perdagangan produk agraris secara antar pulau maupun antar negara.

Pada rentang abad 16-19, ada 2 (dua) golongan produk agraris yang dinilai strategis untuk di perdagangan di pasar Eropa, yaitu beras dan rempah-rempah. Sebelumnya produk agraris yang dominan adalah beras. Ada semacam "jargon politik" yang populer pada waktu itu bahwa "siapa menguasai beras, maka dialah yang menguasai politik" (Pranadji, 2009). Alat tukar yang populer dalam perdagangan produk agraris adalah emas dan beras. Alat tukar uang diperkenalkan bangsa Eropa terutama setelah produk rempah-rempah menjadi mata dagang internasional yang sangat penting. Penetrasi ekonomi uang di daerah Indonesia Timur diawali dengan masuknya perdagangan produk agraris dari daerah ini di pasar Eropa. Dengan masuknya ekonomi uang ini, hubungan patronase kerajaan dengan saudagar lokal menjadi renggang.

Perbedaan budaya, agama dan kepercayaan antar suku bangsa dan antara bangsa tidak menghalangi hubungan perdagangan antar suku bangsa dan antar bangsa. Hubungan antara bangsa Portugis (Kristen/Katolik) dengan masyarakat Ternate dan Tidore (Islam) dalam perdagangan hasil agraris berjalan baik, sebagaimana juga hubungan antara Makassar/Gowa (Islam) dengan Ternate dan Tidore. Justeru pada abad 17 terjadi ketegangan hubungan antara Makassar (pesisir) dengan Bugis (pedalaman) lebih besar dibandingkan dengan (misalnya) antara Portugis (Maluku) dan Makassar. Bagi orang Bugis, dikuasainya bandar Makassar oleh kerajaan Gowa menghalangi akses bangsa Bugis (termasuk Mandar) pada jalur perdagangan internasional.

Masuknya bangsa Inggris dan Belanda membawa wacana baru dalam dinamika perdagangan internasional terhadap produk agraris Indonesia, termasuk yang berasal dari Indonesia bagian timur. Belanda bukan hanya mengadopsi cara orang Inggris dalam

menguasai jalur perdagangan dan ekonomi, melainkan juga berupaya mengintegrasikan antara monopoli perdagangan hasil agraris dengan kekuasaan (politik) yang represif. Kekuatan militer dan persenjataan dijadikan instrumen untuk melakukan ekspansi ekonomi dan menguasai suatu wilayah secara politik. Setelah menguasai bandar Batavia (daerah Indonesia Barat), Belanda melakukan ekspansi ke daerah timur. Tujuan utamanya adalah menguasai jalur perdagangan produk agraris di daerah timur, dengan sasaran utama Bandar Makassar. Bekerja sama dengan Aru Palaka, akhirnya Belanda berhasil menguasai Makassar dan memindahkan Bandar Gowa ke Makassar.

MODERNISASI TANPA PEMBANGUNAN

Dalam perspektif historis, ada gejala menarik yang dapat dikemukakan dalam makalah ini, yaitu mengapa energi globalisasi abad 16 tidak dapat dijadikan pemacu kemajuan agraris kawasan timur Indonesia. Dilihat dari masuknya produk agraris dari kawasan timur Indonesia di pasar Eropa pada abad 15-17 (Reid, 2004; Vlekke, 2009), hal ini menunjukkan bahwa "energi globalisasi" secara potensial telah menjadi penggerak ekonomi perdagangan hasil agraris dari kawasan timur Indonesia. Namun jika dilihat dari apa yang terlihat di lapangan hingga dewasa ini justeru bersifat kontradiktif. Walaupun produk agraris masyarakat petani telah masuk pasar global, namun masyarakatnya hanya dalam posisi pengolah tanah (Onghokam, 1984). Bahkan tata cara masyarakat melakukan proses produksi agraris juga sangat tradisional dan bukan mencerminkan sebagai bagian dari reaksi pasar terbuka.

Produk agraris kawasan timur Indonesia timur telah memasuki pasar global (Usman, 2009; Reid, 2004), namun masyarakat petani belum menjadi bagian dari masyarakat modern (Tjondronegoro, 1977). Beberapa hal yang dapat menjelaskan mengapa globalisasi produk agraris daerah Indonesia timur tidak menjadi energi modernisasi dan pembangunan ekonomi perdesaannya, yaitu:

- a. Struktur sosial-politik mencerminkan struktur masyarakat tradisional agraris yang paternalistik (Pranadji, 2004), dan selama

seabad struktur ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Selain itu aktivitas perdagangan dan ekonomi pasar dikuasai oleh kalangan elit ekonomi yang dekat dengan elit sosial-politik, sehingga ekonomi perdagangan hasil agraris seperti ini tidak mencerminkan *communal based economy*.

- b. Terbentuknya struktur ekonomi yang bersifat dualistik (Boeke, 1982), yaitu ekonomi pedalaman yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan subsisten di satu bagian, serta ekonomi yang berorientasi pada pasar terbuka yang bersifat komersial. Pada struktur yang demikian, mayoritas masyarakat petani di pedesaan dan pedalaman hampir tidak tersentuh berkah dari ekonomi pasar. Gejala yang demikian ini berlangsung melintasi berbagai rezim kekuasaan politik hingga saat ini.
- c. Dalam merancang kebijakan pembangunan agraria pejabat pemerintah pusat dan daerah terbiasa menggunakan cara pandang yang bersifat *inward looking*, pragmatisme sempit dan jangka pendek. Dengan cara pandang demikian akan sulit dibangun sistem agraris yang berciri industri, bermuatan teknologi tinggi, memihak pada kepentingan petani, serta akrab dengan lingkungan.
- d. Kekayaan alam untuk pengembangan pengelolaan sumber daya agraris di kawasan timur Indonesia relatif tinggi. Tanpa sentuhan inovasi teknologi, kelembagaan dan kompetensi SDM yang berarti, maka pengelolaan sumber daya agraris yang ekstraktif hanya dapat menopang kebutuhan subsistensi masyarakat setempat dan kurang mampu menghasilkan *domestic saving* yang relatif besar untuk pengelolaan sumber daya agraris setempat. Para perancang ekonomi, khususnya dari kalangan Ekuin, belum mampu menempatkan potensi agraris sebagai kekuatan strategis untuk pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan prasarana publik lainnya dinilai relatif lemah dan tidak berimplikasi positif terhadap kemajuan ekonomi daerah dengan basis agraris.
- e. Upaya memacu peradaban agraris masih terpusat pada kegiatan di sektor hilir,

terutama pada aspek yang langsung terkait dengan perdagangan internasional. Kemajuan peradaban ini selama lebih dari seabad tidak berhasil ditransmisikan pada kegiatan usaha tani di pedesaan dan kelembagaan perekonomian pedesaan. Sistem agraris dibiarkan pada tahap peradaban agraris subsisten dan tidak dapat dijadikan andalan perekonomian masyarakat pedesaan.

- f. Aspek keorganisasian ekonomi masyarakat desa tidak dijadikan basis pengembangan pengelolaan sumber daya agraria di daerah setempat. Kolektivitas antar petani dan antar kelompok tani relatif tidak dijadikan basis pengembangan organisasi ekonomi masyarakat desa, sehingga kemajuan pengelolaan sumber daya agraria yang seharusnya berorientasi untuk pasar global tidak dapat diserap secara baik dalam kelembagaan di pedesaan.

ARAH POLITIK AGRARIA INDONESIA TIMUR

Kawasan timur Indonesia mempunyai potensi sumber daya agraris yang relatif besar dan beragam. Pengembangan pengelolaan sumber daya agraris di daerah Indonesia bagian timur sangat penting, dan perlu segera dirancang secara sistematis dan lebih terarah. Upaya percepatan transformasi dan pengarahannya kembali (*re-direction*) kegiatan pengelolaan sumber daya agraris di daerah Indonesia bagian timur perlu dijadikan agenda serius pembangunan ke depan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam percepatan transformasi tersebut adalah:

- (1) Pengembangan pengelolaan sumber daya agraris harus berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan. Kegiatan yang dimaksud tidak perlu dilakukan jika akan mengalineasi masyarakat setempat dari sumber-sumber kemajuan. Kompetensi SDM, akses iptek, intensifikasi modal finansial, keorganisasian usaha berbasis pengelolaan sumber daya agraris yang utuh, manajemen usaha yang sehat, kepemimpinan lokal yang kuat, serta struktur masyarakat yang tidak timpang menjadi bagian agenda strategis peren-

canaan pengembangan agraria di daerah Indonesia bagian timur.

- (2) Pengembangan pengelolaan sumber daya agraria di daerah Indonesia bagian timur adalah bagian dari pembangunan perekonomian masyarakat setempat. Agar dapat berlangsung secara berkelanjutan, secara lintas generasi, maka perencanaan pengelolaan sumber daya agraria di daerah perlu dilandaskan pada hubungan interaksional antara modal sosial, infrastruktur dan ekosistem setempat yang bersifat harmonis.
- (3) Pengelolaan sumber daya agraria kawasan timur Indonesia pada masa datang harus menggambarkan (proses) transformasi ke arah industrialisasi yang masif. Peningkatan nilai tambah sumber daya lokal dengan dukungan sentuhan teknologi tinggi, jaringan prasarana ekonomi yang kuat, kompetensi SDM, serta modal finansial yang memadai menjadi bagian dari strategi yang utuh dari perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya agraria di daerah Indonesia bagian timur.
- (4) Indonesia bagian timur bukan saja menggambarkan daerah daratan, melainkan juga daerah kepulauan dan perairan yang kaya sumber kehidupan. Strategi pembangunan yang bias daratan menjadi salah satu penyebab terjadi kemunduran kegiatan pengelolaan sumber daya agraria di daerah Indonesia bagian timur sebagai kawasan ekonomi potensial, dan pengelolaan sumber daya agraria di daerah sebagai bagian dari usaha ekonomi global. Konsep daerah kepulauan dan perairan (*archipelago region*) dijadikan acuan dalam perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya agraria di daerah Indonesia bagian timur.
- (5) Sebagai daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal yang berbatasan dengan banyak negara luar yang lebih maju, kawasan timur Indonesia menjadi daerah yang cukup rawan dari gangguan dan obyek "kenakalan negara luar", kenakalan elit politik pusat, dan elit lokal. Selain itu, daerah ini juga rawan terhadap gerakan-gerakan separatis yang radikal, bahkan mungkin revolusi agraria (Reid, 1979). Oleh sebab itu, perspektif perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya agraria di daerah Indonesia bagian timur

perlu diintegrasikan dengan nilai politik persatuan dan kesatuan geopolitik NKRI.

- (6) Sosok sumber daya agraria kawasan timur Indonesia dapat dipandang sebagai "raksasa yang sedang tidur". Kegiatan pengelolaan sumber daya agraria yang penting diprioritaskan untuk dikembangkan secara intensif kawasan timur Indonesia adalah:
 - a. Usaha berbasis sumber daya peternakan yang diintegrasikan dengan perbaikan agroekosistem dan kekuatan sosio-budaya setempat.
 - b. Usaha berbasis tanaman pangan, yang mencerminkan penguatan kedaulatan pangan lokal dan nasional harus mendapat prioritas tinggi untuk dikembangkan termasuk sistem pertanian pangan organik berbasis sumber daya agroekosistem dan masyarakat lokal.
 - c. Usaha berbasis tanaman industri, seperti kelapa, coklat, cengkeh dan jambu mete, yang merupakan perpaduan antara upaya peningkatan nilai tambah ekonomi dengan penyehatan ekosistem setempat merupakan potensi kemajuan agraris masa depan Indonesia bagian timur yang relatif besar.
 - d. Usaha berbasis pengelolaan hutan secara lestari, sebagai pengintegrasian masyarakat lokal dalam sistem pengawasan hutan secara holistik. Untuk mengatasi kerawanan hutan, akibat *illegal logging*, akan lebih efektif jika melibatkan masyarakat setempat.
 - e. Sumber daya maritim di Indonesia bagian timur selain di satu sisi rusak karena terkuras oleh praktek "rente ekonomi", juga semakin terasing dengan masyarakat setempat. Pengembangan pengelolaan sumber daya maritim (*archipelago based economy*) merupakan salah satu kunci pembuka kemajuan masyarakat dan sistem pertahanan di Indonesia bagian timur.

Dengan menempatkan kawasan timur Indonesia sebagai bagian dari kecerahan masa depan pengelolaan sumber daya agraria Indonesia, sangat diharapkan adanya pemihakan secara komprehensif dari berbagai

kalangan termasuk dari kalangan elit politik. Adalah sangat diharapkan jika organisasi petani bukan hanya mengurus pengelolaan sumber daya agraria di tingkat hulu (usaha tani), melainkan juga mengurus kegiatan di bagian hilir dan tengah (industri). Revitalisasi pertanian di kawasan timur Indonesia harus menjadi agenda bersama antar elemen pembentuk *civil society* setempat dan nasional. Penguatan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya agraria di kawasan timur Indonesia memerlukan sentuhan seni (art) sosial-ekonomi-politik yang jauh dari pendekatan partisan dan sektoral (Pranadji, 2008).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya agraris di kawasan Indonesia bagian timur ke depan benar-benar harus diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Dalam kurun 60 tahun terakhir, perhatian pembangunan termasuk di sektor pertanian terlalu berorientasi pada komoditas dan kegiatan usaha tani yang bernilai tambah rendah. Umumnya kemajuan usaha berbasis sumber daya agraris tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan karena tidak diikuti dengan peningkatan kewirausahaan, peningkatan daya saing, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada kemajuan usaha berbasis sumber daya agraris yang demikian tidak dapat dijadikan landasan kemajuan pembangunan dalam arti luas.

Dari perspektif historis, strategi pengembangan pengelolaan sumber daya agraria di kawasan Indonesia bagian timur perlu dirancang secara kreatif dan visioner. Dengan kata lain perencanaan pengelolannya tidak begitu saja menjiplak yang dilakukan di Indonesia bagian barat. Jika strategi pengembangan pengelolaan sumber daya agraria di kawasan Indonesia bagian barat lebih mengutamakan di sektor hulu dan lemah di sektor hilir, maka untuk Indonesia bagian timur harus yang kuat di kedua sektor, hulu maupun hilir. Kesejahteraan masyarakat yang selama ini cenderung terabaikan di Indonesia bagian barat maka tidak boleh terulang di bagian timur .

Kekhasan agro-ekosistem Indonesia bagian timur juga harus dijadikan pertimbangan penting dalam pengembangan pengelolaan sumber daya agraria. Pendekatan *archipelago based economy* yang selama 30-50 tahun terabaikan perlu dijadikan kekhasan pengembangan sumber daya agraris di daerah ini. Dengan memandang bahwa sumber daya kepulauan dan perairan merupakan aset strategis, maka sangat mungkin Indonesia bagian timur adalah masa depan "raksasa agraris" Indonesia.

Secara geografis sebagian besar kawasan timur Indonesia berupa kepulauan dan perairan dalam. Dalam rangka mewujudkan kawasan timur Indonesia sebagai bagian dari masa depan kemajuan masyarakat bangsa, maka perlu diperhatikan tentang pengembangan jaringan transportasi laut (antar pulau) yang andal di kawasan kepulauan seperti di Maluku dan kepulauan Sangir Thalaud, infrastruktur darat seperti di tanah Papua dan daerah pedalamannya, serta perlu dilakukan modernisasi terhadap sistem pelayaran berbasis masyarakat setempat.

Finansial dan kelembagaannya masih menjadi kendala besar pengembangan pengelolaan sumber daya agraria. Pengembangan jaringan kelembagaan kapital, sistem penyuluhan agroindustrial, dan keorganisasian usaha berbasis sumber daya agraris di pedesaan merupakan bagian penting dari percepatan kemajuan di daerah ini. Berkaitan dengan itu, orientasi utama pengelolaan sumber daya agraris perlu didukung penguatan kewirausahaan setempat serta diintegrasikan dengan penguatan hubungan antara modal sosial atau *local wisdom* dengan pelestarian agro-eko-ekonomi secara lintas generasi.

Perkembangan pengelolaan sumber daya agraris di kawasan timur Indonesia perlu diintegrasikan dengan pengembangan sistem pertahanan nasional secara komprehensif. Sistem pertahanan yang dimaksud harus melibatkan empat komponen , yaitu penguatan basis ekonomi dan kualitas hidup masyarakat komunal setempat, jaringan infrastruktur ekonomi yang lengkap untuk memudahkan perkembangan *corporate society* setempat secara sehat, sistem pemerintahan yang kuat dan berpihak pada masyarakat, serta infrastruktur militer yang andal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2010. Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat. http://www.Crayonpedia.org/mw/BSE:Perjuangan_Bangsa_Indonesia_Merebut_Irian_Barat_9.1_%28BAB_12%29. [26/11/10].
- Anonimous. 2010. Indonesia: Era VOC. World Forum. INDONESIAINDONESIA.COM. <http://www.indonesiaindonesia.com/f/2380-indonesia-era-voc/>. [28/11/10].
- Asba, R. 2007. Kopra Makassar: Perebutan Pusat dan Daerah; Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Boeke, J.H. 1982. Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda. *Dalam* Bunga Rampai Perekonomian Desa (penyunting Sayogyo). Yayasan Agroekonomika. Jakarta.
- de Graaf, H.J. 1986. Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung. Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- de Graaf, H.J dan Th. Pigeaud. 2001. Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI. P.T. Pustaka Utama Grafiti, cetakan IV (edisi revisi). Jakarta.
- Dumont, R. 1971. Agriculture as Man's Transformation to The Rural Environment. *In* Peasants and Peasant Societies (Edited by T. Shanin). Penguin Book Inc. Middlesex.
- Elson, R.E. 2009. The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Serambi. Jakarta.
- Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian: Suatu Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bhratara Aksara. Jakarta.
- Hall, D.G.E. 1988. Sejarah Asia Tenggara. (Penerjemah I.P. Soewarsha dan Penyunting M.H. Mustopo). Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Kartodirdjo, S dan D. Suryo. 1991. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Khudori. 2004. Neoliberalisme Menumpas Petani, Menyingkap Kejahatan Industri Pangan. Resist Book. Jogjakarta. <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=475>. [28/11/10].
- Kleden, I. 2008. Kebudayaan dan Kebangsaan: 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Kompas, 8 September 2008. <http://visibangsanegeri.kita.blogspot.com/> [27/11/10].
- Lombart, D. 2000. Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris. Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lubis, M. 2009. 407 Tahun Petani Diperas Kapitalis. Harian Global, 10 Juni 2009. http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8864:407-tahun-petani-diperas-kapitalis&catid=57:gagasan&Itemid=65 [27/11/10].
- McNeill, W.H. 1964. The Rise of The West: A History of The Human Community. The Iniversity of Chicago Press. Chicago.
- Messakh, M.T. 2009. Sejarah Benteng di Indonesia Timur. The Jakarta Post. <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/13/history-forts-eastern-indonesia.html> [27/11/10].
- Ngadisah. 2002. Gerakan Sosial di Kabupaten Mimika (Studi Kasus tentang Konflik Pembangunan Proyek pertambangan Freeport). Perpustakaan Universitas Indonesia. Jakarta. Disertasi. <http://www.lontar.ui.ac.id//opac/themes/libri2/detail.jsp?id=74501&lokasi=lokal> [28/11/10].
- Onghokam. 1984. Perubahan di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penguasaan Tanah. *dalam* SMP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed), Dua Abad Penguasaan Tanah. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Pranadji, T. 2004. Kerangka Kebijakan Sosio-budaya Menuju Pertanian 2025: Ke arah Pertanian Pedesaan Berdaya Saing Tinggi, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Forum Agro Ekonomi, 22(1):1-21. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Pranadji, T. 2008. Membedah Gorontalo Sebagai Calon "Bintang Timur" Pertanian di Abad 21. Analisis Kebijakan Pertanian, 6(3): 222-238, September 2008. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Pranadji, T. 2009. Reformasi Kelembagaan dan Kemandirian Perekonomian Pedesaan: Kajian pada Kasus Agribisnis Padi Sawah. Kelembagaan DAS. (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: "Peluang Indonesia untuk Mencukupi Sendiri Kebutuhan Beras Nasionalnya", diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, 2 Oktober 2003, di Bogor. <http://kelembagaandas.wordpress.com/reformasi-kelembagaan/tripranadji/> [24/12/09] atau <http://pse.litbang>.

deptan.go.id/ind/pdf/mono25-01
[07/02/10].

- Reid, A. 1979. *The Blood of The People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Oxford University Press. Kuala Lumpur.
- Reid, A. 2004. *Sejarah Modern Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Scott, J.C. 1989. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.
- Sorokin, P. 1964. *Contemporary Sociological Theories: The First Quarter of Twentieth Century*. Harper and Row Publishers. New York.
- Usman, S. 2009. *Perjalanan Sejarah Ekonomi Indonesia*. Dinosman Rendezvous, 3 Oktober 2009. <http://pustaka45.blogspot.com/2009/10/perjalanan-sejarah-ekonomi-modern.html?zx=621da20f23b48ef7> [27/11/10].
- Vlekke, B.H.M 2009. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.